



JURNAL POLITIK PEMERINTAHAN DHARMA PRAJA

e-ISSN 2721-7043 ISSN 1979-8857

Website: <http://ejournal.ipdn.ac.id/JPPDP>

Faculty of Politics Governance, Governance of Home Affairs (IPDN)

JPPDP, Vol 14 No. 2

Doi: <https://doi.org/10.33701/jppdp.v14i2.1572>

LITERASI POLITIK PADA WILAYAH EKS DAERAH TERTINGGAL INDONESIA: STUDI KASUS KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Kuncoro Galih Pambayun¹, Rani Apryani Pregiwati², Rian Dwi Hapsari³

^{1,3} Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor, Sumedang

² Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Jln. H. Abd. Malik Pattana Endeng,

Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Mamuju - Sulawesi Barat (91511)

Email: pambayun@ipdn.ac.id¹, raniapryani7@gmail.com², rian@uptik.ipdn.ac.id³

*corresponding author

E-mail: pambayun@ipdn.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the role of the National Unity and Politics Agency of Polewali Mandar Regency in implementing political literacy based on the information delivery instruction model initiated by Vishal D. Bapte. The authors uses an inductive approach with data collection techniques of observation, interview, and documentation by involving 8 (eight) informants, who were selected purposively. The research findings show that the political literacy activity program that implemented in 2019 has limited regional reach and frequency. It has intangible feedback and felt indirectly for the community, therefore the APBD's more focused on infrastructure development and the community's economy. Social media as a tools for delivering information has not been used. Political guidance through direct instruction also has insignificant influence, because the low level of public political awareness. Based on these findings, the authors conclude that the role of the Political and Unity Agency of Polewali Mandar Regency in implementing political literacy running not optimally, because the indicators of synchronous and asynchronous information delivery are not good.

Keywords: *The Role of National Unity and Political Agency; Political Literacy; Political Education; ex-Underdeveloped Regions of Indonesia*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menyelenggarakan literasi politik berdasarkan model instruksi penyampaian informasi yang digagas oleh Vishal D. Bapte. Penulis menggunakan pendekatan induktif dengan teknik pengumpulan data Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi dengan melibatkan 8 (delapan) informan yang dipilih secara purposive. Temuan penelitian bahwa program kegiatan literasi politik yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 memiliki keterbatasan jangkauan serta frekuensi. Kegiatan literasi politik memiliki feedback yang tidak terlihat (intangible) dan tidak dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, oleh karenanya belum menjadi prioritas khususnya pada wilayah eks daerah tertinggal mengingat APBD lebih difokuskan kepada pembangunan infrastruktur dan ekonomi masyarakat. Media sosial sebagai tools penyampaian informasi secara asynchronous yang seharusnya dapat berjalan efektif dan efisien juga belum

dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan literasi politik masyarakat. Pembinaan politik melalui instruksi secara langsung juga belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perilaku masyarakat, mengingat tingkat kepedulian politik masyarakat masih rendah. Berdasarkan temuan tersebut penulis menyimpulkan bahwa penyelenggaraan literasi politik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar sebagai wilayah eks daerah tertinggal belum berjalan secara maksimal, karena baik dari indikator penyampaian informasi secara synchronous maupun asynchronous keduanya kurang berjalan dengan baik.

Kata kunci: Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Literasi Politik; Pendidikan Politik; Eks Daerah Tertinggal Indonesia

PENDAHULUAN

Setiap orang memiliki cara masing-masing dalam berpartisipasi dan mengekspresikan hak politiknya, baik melalui media sosial, kritik tulisan, meme politik, aksi jalanan (demonstrasi), membentuk komunitas politik, maupun terjun ke dunia politik secara langsung (Arbinata & Warsono, 2021; Jeroense et al., 2021; Mahadian et al., 2019; Parameswara, 2019; Sihidi, 2017; Wong et al., 2021). Masyarakat yang tidak literate dalam berpolitik, akan mudah dimanfaatkan dan terjerumus dalam ujaran kebencian, politisasi sara, *black campaign*, dan tindakan negatif lainnya (Bilewicz & Soral, 2020; Grosjean et al., 2021; Hayat et al., 2021; Lailam & Darumurti, 2021). Terlebih lagi berita *hoax* dengan mudah menyebar luas dan berpotensi menimbulkan tindakan yang mengancam keamanan dan ketertiban umum (Cahyadi & Hermawan, 2021; Putri & Dwipriandi, 2021).

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu dari sekian banyak indikator melek berpolitik. Pada pemilu legislatif 2004 partisipasi mencapai 84,9%, dengan partisipasi pemilihan presiden sebesar 78,2% pada putaran pertama dan 76,6% pada putaran kedua. Pada 2009 partisipasi menurun menjadi 70,9% untuk partisipasi pemilihan legislatif dan 71,7% untuk pemilihan presiden (Miaz, 2012). Pada tahun 2014 partisipasi 72% dalam pemilihan legislatif dan 69,5% untuk pemilihan presiden. Pada pemilu 2019 mengalami kenaikan dengan jumlah partisipasi pemilihan presiden sejumlah 81,97% dan pemilihan legislatif sebesar 81,69% (BPS, 2019; Pulungan et al., 2020). Semakin bertambahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu 2019 menunjukkan bahwa tingkat literasi politik warga negara yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam berpolitik juga mengalami peningkatan.

Literasi politik diperlukan agar warga negara semakin mumpuni dalam

melakukan partisipasi pada kegiatan bernegara, semakin literat baik secara prosedural maupun substansial dalam pemilu (Bev, 2008). Melalui keterampilan dan pengetahuan tersebut akan membentuk dan menumbuhkan pemahaman nasionalisme terutama generasi muda sebagai penunjang kelestarian Pancasila dan UUD 1945 (Sanusi, 2020). Literasi politik juga dibutuhkan untuk menangkal racun politik dalam kondisi maraknya informasi digital yang menyudutkan, provokatif, hoax, fitnah, bernuansa SARA (Mahmud et al., 2019). Dengan kemajuan teknologi informasi, kegiatan dalam mendukung melekat berpolitik akan lebih mudah dilaksanakan karena dapat berlangsung secara daring (virtual), dapat juga secara tatap muka (Malik et al., 2020; Wahid et al., 2020). Gerakan yang juga menjadi tanggung jawab bagi seluruh warga negara, terlebih yang tergabung dalam partai politik, organisasi kemasyarakatan, maupun lembaga pemerintahan (Pasaribu, 2017; Rahayu & Triyanto, 2020; Sukmawati & Rafni, 2020).

Kabupaten Polewali Mandar dewasa ini telah terentaskan dari daftar daerah tertinggal di Indonesia (menjadi *eks* daerah tertinggal). Hal tersebut didasarkan pada penilaian indikator ekonomi dan sumber daya manusia (SDM) yang bergeser ke arah yang lebih baik (ekonomi dan SDM merupakan fokus aspek ketertinggalan

wilayah di kawasan timur Indonesia) (Sari et al., 2020). Namun demikian pandangan politik masyarakat Polewali Mandar belum banyak mengalami perubahan dan bukan merupakan indikator kunci penilaian ketertinggalan wilayah. Politik klan dan klanisasi demokrasi di Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Polewali Mandar pada khususnya masih sangat kuat mengakar. Klanisasi politik di Kabupaten Polewali Mandar pada dasarnya tidak memberikan sedikitpun ruang gerak politik bagi masyarakat luas untuk memperoleh hak politiknya untuk dipilih (Bahtiar & Purwaningsih, 2019; Habiba, 2016). Karena hanya kalangan tertentu saja yang memperoleh kesempatan duduk sebagai elit politik di Polewali Mandar. Misalnya saja semenjak tahun 1998 sampai dengan 2003 dipimpin oleh klan Manggarani dan bergeser ke klan Masdar sampai dengan periode pemilu terakhir (Sahid, 2017). Kuatnya klanisasi juga menutup posisi strategis sekelas ulama yang tidak memperoleh dukungan signifikan dari masyarakat Polewali Mandar (Umar, 2020). Roda demokrasi pada lingkup lokal masih banyak didominasi oleh primordialisme, penggiringan opini intoleransi mengatasnamakan agama, politik identitas, dan sebagainya layaknya pemilu pada lingkup nasional (Hasfi et al., 2017; Herdiansah, 2017; Mahyuddin, 2019).

Penelitian berkaitan dengan literasi politik bukanlah hal yang baru. Misalnya saja penelitian dari Latif tahun 2020 yang membahas tentang masalah literasi politik melalui media sosial pada Pilpres 2019 di Kabupaten Garut (Latif et al., 2020). Penelitian oleh Setiawan dkk berkaitan dengan penyuluhan literasi politik kepada para siswa SMA melalui media online yang dikemas dalam bentuk kegiatan pengabdian masyarakat guna memberikan pemahaman pentingnya literasi politik agar dapat menerima pesan politik dengan tepat oleh para pelajar (Setiawan et al., 2020). Penelitian oleh Bakthiyar dalam mengukur peran media dan perilaku para pemilih milenial menjelang tahun politik 2019 (Bakthiyar, 2019). Penelitian oleh Suqri dkk guna mengukur peran media sosial sebagai alat mempromosikan literasi politik dan keterlibatan kalangan anak muda melalui portal keterlibatan warga secara online yang diadopsi oleh Pemerintah Kesultanan Oman (Al-Suqri et al., 2017). Selanjutnya penelitian studi kasus oleh Kus terkait dengan status literasi politik sejumlah 60 calon guru bidang sosial yang mengenyam pendidikan di Fakultas Pendidikan Universitas Ahi Evran, Turki. (Kus, 2015). Penelitian selanjutnya dilakukan melalui survey terhadap masyarakat, aktivis, civitas akademika (siswa, dosen, tenaga pendidik) jurusan pendidikan di Kanada, Amerika

Serikat, dan Australia berkaitan dengan hubungan antara persepsi, pengalaman, dan perspektif demokrasi dalam kaitannya dengan pendidikan dan potensi literasi politik. (Carr & Thésée, 2018). Penelitian selanjutnya berkaitan dengan literasi politik oleh organisasi kaum hawa untuk mengetahui kontribusi kaum perempuan dalam gerakan literasi politik yang diselenggarakan oleh organisasi koalisi perempuan Indonesia (Novita & Sari, 2019). Dari berbagai penelitian terdahulu belum ada penelitian yang membahas literasi politik pada wilayah *eks* daerah tertinggal menggunakan analisis model instruksi literasi informasi yang digagas oleh Vishal D. Bapte.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan penelitian ini yakni untuk menganalisis bagaimana peran dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam menyelenggarakan literasi politik di wilayah Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, dimana menjadi salah satu daerah yang terentaskan dari penetapan daerah tertinggal di Indonesia pada tahun 2019.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitian pada bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang dalam hal ini digawangi oleh

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar pada penyelenggaraan kegiatan literasi politik pada kurun waktu setelah (pasca) terentasnya Kabupaten Polewali Mandar dari daftar daerah tertinggal di Indonesia (eks daerah tertinggal) yakni pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif (Sugiyono, 2013), dimana data kualitatif diperoleh melalui wawancara secara mendalam terhadap 8 (delapan) informan yang dipilih berdasarkan kewenangan (pengambil kebijakan, pelaksana, dan objek terdampak), serta berdasarkan pengetahuannya berkaitan dengan literasi politik. Selain itu, guna mengetahui gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta fenomena literasi politik di Kabupaten Polewali Mandar, penulis juga memanfaatkan data dukung yang diperoleh melalui pengamatan lapangan dan dokumentasi (Creswell, 2018) yang dilakukan selama 2 bulan yakni mulai dari bulan Desember tahun 2019 sampai dengan bulan Januari tahun 2020. Teknik analisisnya menggunakan metode instruksi literasi informasi yang digagas oleh Vishal D. Bapte yakni meliputi model penyampaian informasi *synchronous* dan *asynchronous* (Bapte, 2019). Model penyampaian *synchronous* dilakukan secara langsung (tatap muka) melalui

berbagai kegiatan sosialisasi ataupun pembinaan secara langsung. Adapun model *asynchronous* tidak dilakukan secara langsung melainkan melalui media yang dapat merangsang masyarakat dalam menemukan dan memanfaatkan informasi politik dengan baik dan benar seperti media sosial, media digital, flyer pamflet, leflet, brosur dan lain sebagainya. Selanjutnya penulis menggunakan prosedur reduksi data yang disesuaikan dengan model studi kasus dalam melakukan analisis data secara menyeluruh (Creswell, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan Literasi Politik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar

Polewali Mandar menjadi daerah tertinggal di Indonesia pada tahun 2015 berdasarkan penetapan Peraturan Presiden nomor 131 tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019. Selanjutnya Polewali Mandar terentaskan dari daerah tertinggal pada tahun 2020 berdasarkan Peraturan Presiden nomor 63 tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024. Secara umum pandangan politik masyarakat Polewali Mandar masih stagnan pada kuatnya politik klan dan klanisasi demokrasi yang membatasi secara sistemik kesempatan berpolitik bagi masyarakat

luas (bukan keturunan klan). Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar perlu menyelenggarakan literasi politik guna menguatkan demokrasi dan keadilan dalam berpolitik. Adapun bentuk penyelenggaraan literasi politik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar yakni pendidikan politik, pembinaan politik dan sosialisasi politik. Kegiatan tersebut juga dioptimalkan dengan tujuan tidak lain untuk menurunkan angka golput seperti pada pilkada Kab Polewali Mandar tahun 2019 sebanyak 26,42% (Rustan & Ariffin, 2019).

Dasar hukum pelaksanaan penyelenggaraan literasi politik mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik. Berdasarkan peraturan tersebut, daerah mempunyai kewajiban mengembangkan kehidupan demokrasi dan untuk mewujudkannya diperlukan pendidikan atau literasi politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berperan menyelenggarakan literasi politik yang diantaranya meliputi sosialisasi pendidikan politik; verifikasi bantuan keuangan partai politik; pemantauan, perkembangan politik di daerah; dan fasilitasi forum dialog publik

Implementasi penyelenggaraan literasi politik di lapangan ternyata masih terdapat beberapa kendala diantaranya

yaitu belum optimalnya pembinaan politik, belum maksimalnya implementasi nilai-nilai demokrasi di bidang politik dalam masyarakat, dan peran infrastruktur politik antara lain partai politik dan tokoh-tokoh politik dalam pembinaan politik yang belum optimal. Kondisi yang ada bahwa sosialisasi pendidikan politik bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan partisipasi oleh masyarakat dalam dunia politik, sehingga masyarakat tidak hanya tau namun dapat lebih mengenal proses politik, sosialisasi pendidikan politik misalnya sudah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, akan tetapi hanya terbatas pada kegiatan sosialisasi bagi pemilih pemula (Razak, Kasubid Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu, Personal Communication, 2019). Selanjutnya dalam rangka mewujudkan kondisi kehidupan masyarakat yang literat dalam melakukan partisipasi politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar juga telah melakukan fasilitasi kepada organisasi politik dan organisasi masyarakat.

Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar yang paling terlihat berdasarkan hasil pengamatan dan dokumentasi penulis yakni memfasilitasi partai politik dalam hal bantuan keuangan partai politik, ditujukan untuk meningkatkan pendidikan politik dari anggota partai politik. Hal

tersebut sejalan dengan informasi yang diperoleh bahwa Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar yang pasti berjalan tiap tahun yakni sebagai tempat fasilitasi penerimaan bantuan keuangan partai politik, dimana bantuan perolehan keuangan yang diterima berdasarkan jumlah suara yang diperoleh (Suryani, Kasubid Pengembangan Budaya dan Etika Politik, Personal Communication, 2019). Selain itu, terdapat program yang telah terlaksana pada pertengahan tahun berjalan yaitu sosialisasi tata kelola bantuan keuangan partai politik yang bertujuan untuk memberikan transparansi kepada masyarakat mengenai tata kelola bantuan partai politik (Musdalifah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar, Personal Communication, 2019).

Dalam penelitian ini penulis memilih dua model penyampaian informasi yakni meliputi model penyampaian instruksi *synchronous* dan *asynchronous* sebagai indikator utama dalam melakukan analisis (Bapte, 2019) yang dijelaskan sebagai berikut.

Model *Synchronous* Literasi Politik di Kabupaten Polewali Mandar

Model penyampaian *synchronous* merupakan metode yang digunakan guna merangsang masyarakat dalam menemukan dan memanfaatkan informasi

politik dengan baik dan benar yang dilakukan secara langsung (tatap muka). Bentuk dari model literasi informasi yang disampaikan secara tatap muka oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar yakni berupa sosialisasi dan pembinaan politik secara langsung terhadap masyarakat dan berbagai macam forum komunikasi yang ada di Kabupaten Polewali Mandar.

Temuan penelitian berkaitan dengan penyelenggaraan sosialisasi politik yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar yakni sosialisasi belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat termasuk juga terhadap kalangan pemilih pemula, serta frekuensi kegiatannya yang sangat minim. Penyelenggaraan sosialisasi pemilu Pada kalangan pemilih pemula hanya dilakukan di beberapa Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Polewali Mandar (Musdalifah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar, Personal Communication, 2020). Masih banyak objek sosialisasi yang tidak tersentuh, sesuai dengan informasi dari informan wawancara yang dipilih secara purposive yang menyebutkan bahwa “informasi mengenai sosialisasi pelaksanaan pemilihan umum yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bagi pemilih pemulla dilakukan di

beberapa Sekolah Menengah Atas dan belum menjangkau ke seluruh sekolah tingkat atas (SMA sederajat)” (Syaputri, Masyarakat objek literasi, personal communication, 2020). Hal tersebut terjadi dikarenakan keterbatasan anggaran dan belum adanya pos pembiayaan yang diperoleh dari pihak donatur. Dampaknya bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar tidak memiliki banyak kegiatan berkaitan dengan literasi politik, terlebih karena adanya prioritas lainnya yang lebih penting mengingat kegiatan literasi politik ini *feedback*-nya tidak dirasakan secara langsung (tidak berbentuk fisik), dimana APBD lebih difokuskan kepada pembangunan infrastruktur dan ekonomi masyarakat (Musdalifah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar, Personal Communication, 2020). Komponen penganggaran yang terbatas juga masih berkaitan dengan adanya perubahan kelembagaan pada OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2016, dimana SKPD Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sempat dibubarkan kelembagaannya dan dilimpahkan kewenangannya ke Bagian Sekretariat Daerah. Selanjutnya OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dimunculkan kembali. Hal tersebut menimbulkan eksistensi Badan di

masyarakat menurun dan kurang menarik perhatian pihak legislatif (Rizaluddin, Kasubid Pengembangan Budaya Etika dan Politik, Personal Communication, 2020).

Pembinaan politik sebagai wujud penyelenggaraan literasi politik kepada masyarakat Polewali Mandar juga belum dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Masyarakat secara umum memiliki kepedulian yang rendah akan pendidikan politik, masyarakat menganggap pendidikan politik hanya untuk mereka yang ingin tergabung dalam dunia politik, yang melakukan segala cara untuk masuk dalam dunia politik (Syaputri, Masyarakat objek literasi, personal communication, 2020). Pendidikan yang seharusnya memiliki peran terhadap pemahaman politik terutama partisipasi politik (Olii, 2018), akan tetapi faktanya bahwa pemuda dengan tingkat pendidikan yang lebih baik justru lebih memilih merantau (*sompe'*) dan bermigrasi (*malleke' dapureng*) sebagai bentuk pengakuan sosial yang lebih baik apabila berhasil di rantau (Pambayun et al., 2020). Hal ini juga terjadi pada pemuda di Kabupaten Polewali Mandar dan secara tidak langsung berdampak terhadap penurunan partisipasi politik dan pembangunan daerah di Kabupaten Polewali Mandar. Begitu juga terjadi pada masyarakat kalangan pendidikan rendah (termasuk putus sekolah) dan kaum

menengah ke bawah (penduduk miskin), masyarakat hanya berpikir untuk memenuhi kebutuhan dasar sebagai prioritas utama. Meskipun mengalami penurunan persentase kemiskinan dari tahun 2015 hingga 2020, penduduk miskin Kabupaten Polewali Mandar masih tergolong tinggi, lebih tinggi sekitar 3-5% diatas persentase penduduk miskin nasional dengan data persentase penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya berturut-turut tahun 2015-2020 yakni 18,43% (2015), 17,06% (2016), 16,05% (2017), 15,97% (2018), 15,60% (2019), 15,26% (2020) (*Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar*, 2021). Adapun angka partisipasi sekolah terutama pemuda usia 16-18 tahun juga terbilang cukup rendah, terlihat dari data Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18 tahun 2015-2020 yakni 66,26% (2015), 67,15% (2016), 66,85% (2017), 63,95% (2018), (2019 tidak ditemukan data), 64,30% (2020) (*Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar*, 2021). Hal tersebut menunjukkan tingginya jumlah masyarakat Polewali Mandar yang memiliki orientasi pada pemenuhan kehidupan dasar tanpa memandang sedikitpun untuk berpartisipasi dalam proses politik maupun bernegara. Informasi tersebut sejalan juga dengan hasil wawancara yang menyebutkan bahwa Masyarakat seperti kami merasa tidak memiliki pengaruh dari kegiatan

politik yang terjadi, harapan dan pemikiran yang ada di benak kami hanya ingin tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari (Jalaluddin, Petugas Kebersihan Jalan, Personal Communication, 2020) “. Berdasarkan informasi tersebut, penulis dapat mengetahui bahwa masyarakat secara umum memiliki partisipasi yang kurang dalam proses politik dan memiliki kepedulian yang rendah terhadap penyelenggaraan literasi politik.

Bentuk pembinaan politik selanjutnya yang telah dilakukan yakni program pemantauan dan perkembangan politik melalui forum dialog publik. Hal tersebut dikarenakan forum dialog publik menjadi salah satu unsur penting yang berperan dalam meningkatkan nilai-nilai demokrasi masyarakat serta dalam penyelesaian masalah-masalah yang terjadi dimasyarakat yang berkaitan dengan politik, kesatuan dan persatuan bangsa. Forum tersebut antara lain meliputi: pemberdayaan organisasi kemasyarakatan/LSM guna menjaga ketentraman dan ketertiban dengan tidak menimbulkan potensi untuk memicu konflik dalam mewujudkan ketahanan daerah di Kabupaten Polewali Mandar; Tim Kewaspadaan Dini Daerah Kabupaten Polewali Mandar (forum komunikasi dan koordinasi yang dibentuk oleh Bupati Polewali Mandar dimana terdiri dari unsur

Intelijen dan unsur pimpinan daerah di Kabupaten Polewali Mandar); Forum Pembauran Kebangsaan (wadah yang dibentuk oleh masyarakat dan melalui fasilitasi oleh pemerintah daerah guna menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan); Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupen Polewali Mandar (wadah yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan); dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupen Polewali Mandar (wadah yang dibentuk oleh masyarakat dan melalui fasilitasi oleh pemerintah daerah guna menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat). Melalui peran masing-masing forum tersebut, jika berjalan dengan baik maka dapat diyakini bahwa fungsi-fungsi pemerintahan berupa pengaturan, pelayanan, dan pemberdayaan akan lebih mudah terlaksana. Secara umum forum tersebut berjalan apa adanya, dukungan terutama berkaitan dengan pembiayaan terhadap keberadaan forum-forum dimaksud juga belum maksimal (Musdalifah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar, Personal Communication, 2020).

Media Sosial Sebagai Model *Asynchronous* Literasi Politik di Kabupaten Polewali Mandar

Media sosial ataupun media digital merupakan salah satu komponen penting yang membentuk pola pikir politik masyarakat pada umumnya termasuk di Kabupaten Polewali Mandar. Pasalnya media sosial kini telah menjadi kebutuhan yang tak terpisahkan terutama bagi para generasi muda saat ini (milenial). Media sosial dinilai efektif guna mendukung pemikiran milenial dan masyarakat pada umumnya dalam menentukan pandangan politiknya. Media sosial menjadi perantara yang ampuh karena berita dan informasi politik dapat dengan mudah tersampaikan kepada user, sebaliknya mampu menjadikan bumerang apabila pemahaman literasi masyarakat rendah hanya menelan informasi yang beredar tanpa melakukan filter dan kroscek terhadap informasi pada media lainnya. Oleh karena itu pentingnya peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melakukan literasi politik kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk pendidikan politik.

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai beberapa kaum milenial yang berlatar belakang pendidikan atau setidaknya sedang menempuh pendidikan sarjana sederajat. Para milenial sepakat bahwa media sosial merupakan media pembelajaran politik secara tidak langsung, namun tantangannya sekarang ini adalah jika seseorang asal memahami informasi pada media tertentu tanpa ada filter dan

diskusi dengan pakar atau orang yang lebih paham, maka hanya akan meyakini berita yang tidak benar. Kaum milenial juga meyakini bahwa sebagian besar informasi yang mereka peroleh adalah informasi dalam bentuk digital/online karena lebih mudah, efektif dan *up to date* (Syaputri, Masyarakat objek literasi, personal communication, 2020). Oleh karenanya penting untuk melakukan kroscek informasi (penelusuran informasi yang lebih mendalam) agar terhindar dari salah tafsir publik terkait proses politik yang sedang berlangsung. Aspek teknis sosialisasi dan pendidikan politik ini juga diperlukan sebagai upaya pendukung agar masyarakat tidak tabu terhadap politik dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang melek politik agar masyarakat memiliki pemikiran kritis terhadap fenomena yang ada. Media online maupun media sosial sebagai fasilitas yang canggih merupakan alat komunikasi politik yang cukup menjanjikan, oleh karenanya inilah peluang bagi para influencer, aktor politik, partai politik, pemerintah dan lembaga sosial masyarakat untuk memanfaatkan teknologi yang ada sebagai terobosan dunia politik. Beberapa pihak telah memanfaatkan media maupun sosial media dengan maksimal. Meskipun demikian belum mampu dimanfaatkan secara maksimal oleh badan. Hal tersebut terlihat dari minimnya informasi pemilu yang

disampaikan melalui media sosial oleh badan, salah satunya pada akun facebook Badan Kesbangpol. Sosialisasi yang dilakukan sebagai bentuk edukasi pemilih akan pentingnya berpartisipasi masih terbatas pada konteks memberikan hak suara pada pesta pemilu 2019. Oleh karenanya materi yang disampaikan terbatas pada informasi berkaitan dengan persyaratan administrasi, tata cara mencoblos dan jenis-jenis surat suara pemilu 2019.

Kondisi tersebut salah satunya dikarenakan adanya keterbatasannya personil yang mampu mendukung penyelenggaraan kegiatan literasi politik di Kabupaten Polewali Mandar baik secara langsung, terlebih juga secara daring. Hambatan lainnya dalam pelaksanaan penyelenggaraan literasi politik melalui media online di Kabupaten Polewali Mandar adalah kondisi infrastruktur internet yang juga terbatas, akun media sosial sebagai media *asynchronous* literasi politik di Kabupaten Polewali Mandar yang masih sangat baru dengan keterbatasan konten yang dipublikasi. Tercatat dalam rekam digital bahwasanya terdapat satu kali kegiatan sosialisasi politik yang diliput oleh media beritanasional.id bertajuk “Kesbangpol Kabupaten Polman Gelar Sosialisasi Undang Undang Politik: Meningkatkan Partisipasi Politik Bagi Pemilih Pemula”

(Wahyuni, Redaksi Berita Nasional, 14 Maret, 2019). Meskipun hanya dilakukan secara perwakilan oleh peserta pelajar SMA sederajat akan tetapi diharapkan mampu mewakili dan meneruskan informasi kepada seluruh pelajar SMA yang ada di Polewali Mandar sebagai pemilih generasi milenial.

Jaringan internet sebagai kebutuhan kunci tersampainya informasi melalui media online juga belum mampu menjangkau hingga ke pelosok Kabupaten Polewali Mandar. Berdasarkan pengamatan penulis dilapangan bahwa beberapa provider internet nasional seperti Telkomsel, Tri, dan IM3 sudah dapat dijangkau di sebagian besar kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar, akan tetapi masih terkendala juga dengan adanya pemadaman listrik (pengaturan maupun faktor alam) yang juga sangat berpengaruh terhadap aksesnya terutama provider selain Telkomsel. Kecamatan yang secara merata memiliki akses jaringan internet yang baik hanya terdapat di 4 kecamatan dari total 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar yakni Kecamatan Polewali, Kecamatan Wonomulyo, Kecamatan Matakali, dan Kecamatan Tinambung. Sementara di kecamatan lain akses jaringan internet yang cukup baik hanya pada titik tertentu pada pusat kecamatan. Terlebih dengan kondisi geografis kepulauan Sulawesi yang tersusun

oleh tatanan tektonik yang kompleks terkhusus deretan pantai Sulawesi Barat yang merupakan daerah yang dilalui oleh aktivitas Sesar Naik Mamuju (*Mamuju thrust*) yang masih sangat aktif memicu terjadinya gempa bumi hingga ke Polewali Mandar (Susanto et al., 2020), yang tentunya berpengaruh besar terhadap terkendalanya akses jaringan internet di Kabupaten Polewali Mandar. Meskipun demikian secara umum perilaku masyarakat Polewali Mandar khususnya generasi milenial bergerak sejalan dengan perkembangan teknologi informasi yang sebagian besar menggunakan media sosial sebagai *tools* untuk komunikasi dan menyampaikan pendapat secara efektif dan efisien.

Diskusi Temuan Penelitian

Temuan utama penelitian bahwa program kegiatan literasi politik yang telah disampaikan pada tahun 2019 memiliki keterbatasan jangkauan serta frekuensi. Penulis juga menemukan bahwa media sosial merupakan *tools* yang efektif dan efisien sebagai media penyampaian literasi politik. Hal tersebut sejalan dengan temuan dari Latif tahun 2020 yang mengkaji tentang masalah literasi politik melalui media sosial pada Pilpres 2019 di Kabupaten Garut bahwa media sosial mempengaruhi proses literasi politik generasi milenial, dimana mereka dapat

menilai informasi tentang politik berdasarkan argumen yang relevan dengan media yang mereka baca, melalui forum seminar, diskusi di organisasi dan media informasi yang disajikan valid guna terciptanya masyarakat kritis yang kompeten dan literasi politik dengan diskusi argumentatif (Latif et al., 2020). Sejalan juga dengan temuan Setiawan dkk bahwa media sosial dianggap sebagai media yang penggunaannya mudah, termasuk juga penyebarannya, sehingga siapa saja dapat menggunakannya, diperlukan kesiapan, kesadaran dan pengetahuan yang cukup bagi para penggunanya (Setiawan et al., 2020). Di Oman, media sosial dimanfaatkan sebagai alat yang relevan dalam mempromosikan literasi politik dan keterlibatan warga di kalangan anak muda salah satunya guna mengurangi potensi konflik politik (mengingat tingkat pengangguran kaum muda yang tinggi di Oman) dan mempromosikan pendekatan partisipatif dalam pembuatan kebijakan (Al-Suqri et al., 2017). Media akan membentuk opini publik dan pencitraan politik secara sendirinya (Bakhtiyar, 2019). Sayangnya media sosial sebagai *tools* penyampaian informasi secara *asynchronous* yang dinilai lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan literasi politik masyarakat pada tahun 2019 belum dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Badan.

Penulis juga menemukan bahwa perilaku masyarakat berpendidikan yang dianggap lebih literat dalam berpolitik justru tidak dapat berpartisipasi secara langsung karena lebih memilih merantau untuk mencari penghidupan yang lebih layak. Sebaliknya perilaku masyarakat menengah kebawah cenderung kurang peduli terhadap kegiatan politik, karena mereka masih menganggap bahwasanya berpolitik itu tabu dan hanya berpandangan pada perolehan kekuasaan melalui segala cara. Masyarakat miskin cenderung lebih memikirkan pekerjaan dalam kesehariannya guna memenuhi nafkah keluarga. Sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Kus bahwasanya jenjang pendidikan tidak terlalu sejalan dengan kepedulian yang tinggi terhadap politik. hasilnya bahwa kurangnya kepedulian dari sejumlah responden yang diteliti (60 calon guru bidang sosial yang mengenyam pendidikan di Fakultas Pendidikan Universitas Ahi Evran, Turki) terhadap kebijakan dan literasi politik di Turki. Meskipun sering berdiskusi tentang masalah nasional dan internasional, mereka tidak menunjukkan partisipasi aktif untuk memberikan literasi politik terhadap masyarakat (Kus, 2015). Sejalan juga dengan hasil survey Carr & Thésée terhadap masyarakat, aktivis, civitas akademika (siswa, dosen, tenaga pendidik) jurusan pendidikan di Kanada, Amerika

Serikat, dan Australia berkaitan dengan hubungan antara persepsi, pengalaman, dan perspektif demokrasi dalam kaitannya dengan pendidikan dan potensi literasi politik. Temuannya bahwa pada dasarnya responden memiliki kesadaran kritis, konsep demokrasi dan keadilan sosial yang memiliki pengaruh terhadap kemampuan untuk mengatur perubahan sosial, akan tetapi kecenderungan memiliki keterlibatan yang pasif (Carr & Thésée, 2018).

Penelitian selanjutnya berkaitan dengan literasi politik oleh organisasi kaum hawa yang menemukan bahwa perempuan dapat berkontribusi dalam gerakan literasi politik melalui kegiatan kelas politik, edukasi terhadap pemilih, serta program pendidikan politik lainnya yang diselenggarakan oleh organisasi koalisi perempuan Indonesia agar perempuan dapat secara aktif terlibat dalam sistem politik demi terakomodirnya kepentingan perempuan (Novita & Sari, 2019). Temuan ini menarik mengingat terbatasnya kegiatan literasi politik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Beberapa komponen kegiatan seyogyanya dapat diaplikasikan juga di Kabupaten Polewali Mandar guna meningkatkan eksistensi terhadap Badan yang baru terbentuk kembali pada tahun 2017. Dengan demikian diharapkan Badan akan memperoleh perhatian kembali terutama berkaitan dengan dukungan anggaran

untuk kegiatan literasi politik yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Literasi merupakan jawaban atas permasalahan yang terjadi agar masyarakat generasi sekarang lebih literat dan bijak dalam memanfaatkan informasi yang diperolehnya termasuk dalam bidang politik guna meningkatkan kualitas hidup dan kehidupannya. Penulis menyimpulkan bahwa penyelenggaraan literasi politik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar sebagai wilayah eks daerah tertinggal belum berjalan secara maksimal, karena baik dari indikator penyampaian informasi secara *synchronous* maupun *asynchronous* keduanya kurang berjalan dengan baik. Sebagai daerah *eks* tertinggal pada tahun 2019, literasi politik bukanlah sebuah prioritas melainkan pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Literasi politik yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar juga belum dilakukan secara kolaboratif dan belum berfokus pada sistem literasi politik yang berkelanjutan, melainkan hanya sebatas rangkaian kegiatan pemilu 2019.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Suqri, M. N., AlKindi, S. S., & Al-

- Kindi, A. K. (2017). An Evidence-Based Approach to the Use of Social Media to Promote Political Literacy among Youth in the Sultanate of Oman. *International Journal of E-Politics (IJEP)*, 8(2), 30–39. <https://doi.org/10.4018/IJEP.2017040103>
- Arbinata, F., & Warsono, W. (2021). Konstruksi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Tentang Demonstrasi Sebagai Saluran Penyampaian Aspirasi Politik. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 9(1), 109–123. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraan/article/view/37889>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar. (2021). <https://polewalimandarkab.bps.go.id/statictable.html>
- Bahtiar, S., & Purwaningsih, T. (2019). Clan Masdar in Local Political Contestation (Social-Political Capital Role in Political Marketing). *Journal of Governance and Public Policy*, 6(3), 252–269. <https://host-pustaka.umy.ac.id/index.php/GPP/article/view/7290>
- Bakthiyar, B. (2019). Dinamika Literasi Politik Menjelang Tahun 2019: Urgensitas Memahami Perilaku Pemilih Milenial. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 3(2), 65–72. <https://doi.org/10.17977/um021v3i2p65-72>
- Bapte, V. D. (2019). Information Literacy Instruction: Determining the Place of Library Professionals. *DESIDOC Journal of Library & Information Technology*, 39(1). <https://doi.org/10.14429/djlit.39.1.13676>
- Bev, J. S. (2008). *The urgency of teaching political literacy* | Jennie M. Xue. Asia Blogging Network. <https://www.jenniexue.com/the-urgency-of-teaching-political-literacy/>
- Bilewicz, M., & Soral, W. (2020). Hate speech epidemic. The dynamic effects of derogatory language on intergroup relations and political radicalization. *Political Psychology*, 41, 3–33. <https://doi.org/10.1111/pops.12670>
- BPS. (2019). *Statistik Politik 2019* (Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan (Ed.)). Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Cahyadi, R., & Hermawan, D. (2021). *Pandemi Covid 19 Studi Rawan Konflik Pilkada 2020 dan Perilaku*

- Politik Masyarakat*. AURA Publishing.
<http://repository.lppm.unila.ac.id/27806/>
- Carr, P. R., & Thésée, G. (2018). Democracy, Political Literacy and Transformative Education (DPLTE): What issues and trends have emerged over the past ten years? In *E-Democracy by the People (and nonhumans)* (p. 250).
https://vbn.aau.dk/ws/portalfiles/portal/289524688/bythepeople_final.pdf#page=258
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications.
- Creswell John W., C. J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications.
<https://doi.org/http://library.lol/main/83062CFF3138F575F40184FC3FF7C2DA>
- Grosjean, P. A., Masera, F., & Yousaf, H. (2021). Whistle the racist dogs: Political campaigns and police stops. *Centre for Economic Policy Research (CEPR)*.
<https://ssrn.com/abstract=3783906>
- Habiba, H. (2016). *Klanisasi Politik Kabupaten Polewali Mandar (Studi Kasus Politik Klan H. Andi Masdar Pasmara)*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1600/>
- Hasfi, N., Santosa, H. P., & Lukmantoro, T. (2017). Primordialism through Hoax and Fake News during the 2014 Presidential Election of Indonesia. *ICISPE International Conference*.
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/57489857/Digital_Media_and_Unequality_during_2014th_Indonesian_Presidential_Election.pdf?153850102=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPrimordialism_through_Hoax_and_Fake_News.pdf&Expires=1614578407&Si
- Hayat, M. A., Jayadiningrat, S., Wibisono, G., & Iyansyah, M. I. (2021). Peran Media Sosial Dalam Komunikasi Politik. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(1), 104–114.
<https://doi.org/10.36418/jist.v2i1.61>
- Herdiansah, A. G. (2017). Politisasi identitas dalam kompetisi pemilu di Indonesia pasca 2014. *Jurnal Bawaslu*, 3(2), 169–183.
<https://bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/02> JURNAL

- BAWASLU.pdf
- Jeroense, T., Luimers, J., Jacobs, K., & Spierings, N. (2021). Political social media use and its linkage to populist and postmaterialist attitudes and vote intention in the Netherlands. *European Political Science*, 1–23. <https://doi.org/10.1057/s41304-020-00306-6>
- Kus, Z. (2015). Political literacy status of pre-service social studies teacher. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 177, 197–202. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.02.383>
- Lailam, T., & Darumurti, A. (2021). Pemberdayaan Pimpinan Cabang Nasyiatul ‘Aisyiyah Ngampilan dan Komite Independen Sadar Pemilu Dalam Melawan Hoax dan Negative Campaign pada Pemilu Tahun 2019. *Panrita Abdi-Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 5(1), 100–109. <https://doi.org/10.20956/pa.v5i1.7596>
- Latif, E. A., Afandi, I., & Darmawan, C. (2020). The Role of Social Media as a Means of Political Literacy of Millennials in the 2019 Presidential Elections Process (A Case Study in Garut Regency). *Journal of International Conference Proceedings*, 3(1), 81–95. <https://doi.org/10.32535/jicp.v2i4.783>
- Mahadian, A. B., Sugandi, M. S., & Prasetio, A. (2019). Evolusi Wacana Politik dalam Internet Meme. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 23(1). <https://doi.org/10.31445/jskm.2019.1720>
- Mahmud, M., Wutsqah, U., Atikah, T., & Kusnadi, E. (2019). The Urgency of Citizenship Education in Building Citizen Political Literacy in the Digital Era. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 2nd Annual Civic Education Conference (ACEC)*, vol 419. <https://www.atlantispress.com/proceedings/acec-19/125937424>
- Mahyuddin, M. (2019). The Crisis of Intolerance and Primordialism in the Name Of Religion in Indonesia: a Case Study Of Pilkada DKI Jakarta at 2017. *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, 12(1), 94–110. <http://ejurnal.stainparepare.ac.id/index.php/kuriositas/article/view/776>
- Malik, I., Khaerah, N., Prianto, A. L., & Hamrun, H. (2020). Edukasi politik virtual era demokrasi digital pada

- sekolah menengah kejuruan. *Masyarakat Berdaya Dan Inovasi*, 1(1), 39–47. <https://doi.org/10.33292/mayadani.v1i2.14>
- Miaz, Y. (2012). *Partisipasi Politik: Pola Perilaku Pemilih pada Masa Orde Baru dan Reformasi*. UNP Press. <https://doi.org/http://repository.unp.ac.id/72/1/BUKU%202.pdf>
- Novita, A., & SARI, M. M. K. (2019). Orientasi Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Jawa Timur Melakukan Literasi Politik Guna Mendorong Penguatan Perempuan Dalam Politik. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 7(3). <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraan/article/view/30596>
- Olii, R. R. (2018). Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat di Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan Pada Pilkada Kota Palu Tahun 2015. *EDU CIVIC*, 6(01). <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/EduCivic/article/view/11201>
- Pambayun, K. G., Hapsari, R. D., & Dzuljalali, D. (2020). Lorong Literasi Gowa Programs in Paccinongang Sub District. *Indonesian Journal of Librarianship*, 1(1), 44–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/ijolib.v1i1.1051>
- Parameswara, A. V. (2019). *Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia di Kota Palembang)*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH. <http://repository.radenfatah.ac.id/3947/>
- Pasaribu, P. (2017). Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 5(1), 51–59. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v5i1.1125>
- Pulungan, M. C., Rahmatunnisa, M., & Herdiansah, A. G. (2020). Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2019. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 3(2), 251–272. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/politea/article/view/2439>
- Putri, F. A., & Dwipriandi, R. (2021). Efektivitas Kampanye Dalam

- Jaringan: Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 10. <https://doi.org/10.20961/jas.v10i0.47645>
- Rahayu, I. P. S., & Triyanto, T. (2020). PERAN PARTAI POLITIK DALAM PENDIDIKAN POLITIK BAGI GENERASI MUDA. *Jurnal PPKn: Penelitian Dan Pemikiran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 8(2), 128–136. <https://doi.org/10.2019/jppkn.v8i2.19>
- Rustan, I. R., & Ariffin, M. (2019). Perilaku Pemilih Pemula Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat Periode 2019-2024. *MITZAL (Demokrasi, Komunikasi Dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 4(2). <https://journal.lppm-unasman.ac.id/index.php/mitzal/article/view/457>, <http://dx.doi.org/10.35329/mitzal.v4i2.457>
- Sahid, M. (2017). *Dari Era Orde Baru ke Reformasi (Studi terhadap Sirkulasi Klan Manggarani, Mengga dan Masdar di Polewali Mandar)*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/8006/>
- Sanusi, A. R. (2020). Implementasi pendidikan politik Gerakan Pemuda Anshor Kabupaten Karawang dalam menumbuhkan pemahaman nasionalisme generasi muda Nahdatul Ulama. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 17(2). <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/22016>, <https://doi.org/10.21831/jc.v17i2.22016>
- Sari, E. A., Saragih, M. T. B., Shariati, I. A., Sofyan, S., Al Baihaqi, R., & Nooraeni, R. (2020). Klasifikasi Kabupaten Tertinggal di Kawasan Timur Indonesia dengan Support Vector Machine. *JIKO (Jurnal Informatika Dan Komputer)*, 3(3), 188–195. <http://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/jiko/article/view/2364>, <http://dx.doi.org/10.33387/jiko.v3i3.2364>
- Setiawan, A., Zaman, A. N., & Gunanto, J. (2020). Penyuluhan Literasi Politik Melalui Media Online Bagi Siswa SMA 25 Muhammadiyah Tangerang Selatan. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*, 1(1). <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/se>

- mnaskat/article/view/8865
- Sihidi, I. T. (2017). *Ekspresi Voluntersisme Politik Studi Teman Ahok Di Pilkada DKI Jakarta 2017*. Universitas Gadjah Mada. http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/114601
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sukmawati, A., & Rafni, A. (2020). Peran Organisasi Kepemudaan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Bagi Pemuda di Kota Padang. *Journal of Civic Education*, 3(2), 191–199. <https://doi.org/10.24036/jce.v3i2.349>
- Susanto, E., Nurana, I., & Setyahagi, A. R. (2020). Pemodelan Run-up Tsunami di Wilayah Pesisir Pantai Sulawesi Barat. *Buletin GAW Bariri*, 1(2), 87–93. <http://www.gawpalu.id/bgb/index.php/bgb/article/view/25>
- Umar, S. U. (2020). *Ulama dan Politik (Studi Peran Ulama dalam Kontestasi Politik di Kabupaten Polewali Mandar*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. <http://repository.uin-alauddin.ac.id/17158/>
- Wahid, U., Aminudin, A., Afdjani, H., Sumardi, E., & Rosita, R. (2020). Penyuluhan Partisipasi Politik Dan Sosial Media Bagi Pemilih Pemula Pemilukada 2020 Di Sekolah Menengah Atas (SMA) Islam Cikal Harapan 01 Serpong Tangerang Selatan. *RESONA: Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 96–116. <https://doi.org/10.35906/resona.v4i2.585>, <http://www.journal.stiem.ac.id/index.php/resona/article/view/585>
- Wong, M. Y. H., Kwong, Y., & Chau, V. Y. W. (2021). Democracy, constitutional framework, and human rights: A comparison of Monaco, Tonga, Hong Kong, and Singapore. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 64, 100438. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2020.100438>